

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu kegiatan bepergian yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu dari suatu tempat asal ke tempat yang lain (daerah tujuan wisata), semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi dalam rangka memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai industri pariwisata yang mempunyai kaitan erat seperti transportasi, jasa akomodasi/penginapan, restoran, pemandu wisata, dan lain-lain. Industri-industri pariwisata ini memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata.

Dalam menjalankan perannya, industri pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal. Industri-industri pariwisata yang sangat berperan dalam pengembangan pariwisata diantaranya adalah usaha jasa akomodasi atau industri perhotelan. Sehingga pengembangan industri kepariwisataan khususnya industri jasa akomodasi/perhotelan semakin penting, tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga untuk dampak ekonomi yang ditimbulkan seperti meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha.

Fungsi utama dari hotel adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tamu (wisatawan atau pelancong) sebagai tempat tinggal sementara. Pada umumnya kebutuhan utama para tamu dalam hotel adalah istirahat, tidur, mandi, makan, minum, hiburan dan lain-lain. Namun dengan perkembangan dan kemajuan hotel sekarang ini, fungsi hotel bukan saja sebagai tempat menginap atau istirahat bagi para tamu, namun fungsinya bertambah sebagai tujuan konferensi, seminar, lokakarya, musyawarah nasional dan kegiatan semacam itu yang tentunya membutuhkan sarana dan

prasarana yang lengkap. Dengan demikian fungsi hotel sebagai suatu sarana komersial berfungsi bukan hanya untuk menginap, beristirahat, makan dan minum tetapi juga sebagai tempat melangsungkan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tujuan pendirian hotel tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dianggap penting untuk melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai perusahaan/usaha jasa akomodasi. Pengumpulan data statistik hotel dan akomodasi ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Nama dan alamat hotel diperoleh dari hasil pendataan lapangan tahun sebelumnya. Sehingga untuk pelaksanaan tahun 2022, daftar nama dan alamat hotel menjadi semakin lengkap.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Pelaksanaan KP

Sebagai gambaran bagi mahasiswa tentang dunia kerja yang akan dihadapi sebenarnya dan penerapan teori yang didapatkan selama perkuliahan serta mendapatkan pengalaman baru.

1.2.2 Tujuan Pembuatan Laporan

Memenuhi Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) Yang Merupakan Salah Satu Mata Kuliah Program S1 Teknik Telekomunikasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

1.3 Ruang Lingkup

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung mulai tanggal 1 September 2022 sampai dengan 30 september 2022 di Badan Pusat Statistika Kabupaten Banyumas. Penulis di tempatkan pada unit kerja Deputi Bidang Statistik Sosial.

1.4 Aspek Umum Kelembagaan

1.4.1 Sejarah Perusahaan/Instansi

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan

UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik [1].

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

- a. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- b. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- c. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- d. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
- b. Membantu kegiatan statistik di kementrian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- c. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.

- d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

1.4.2 Visi dan Misi

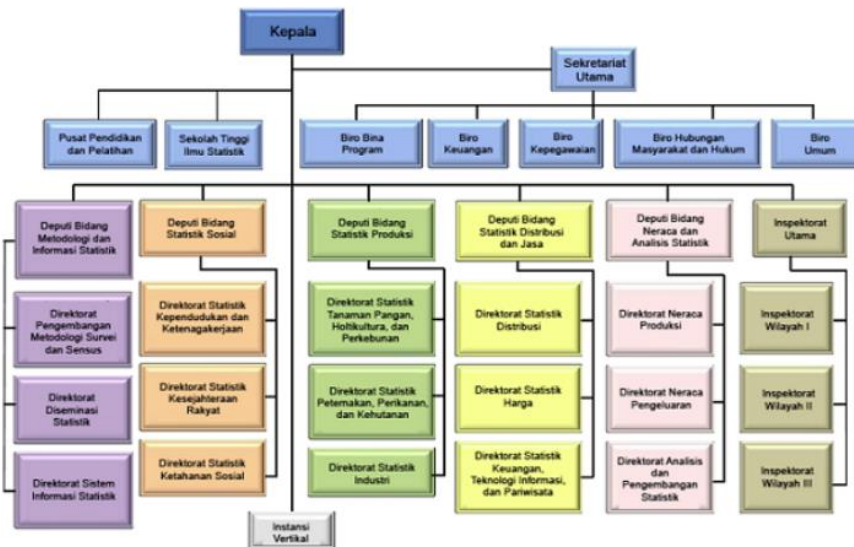
1.4.2.1 Visi Instansi

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

1.4.2.2 Misi Instansi

- a. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
- b. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
- c. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
- d. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan Amanah.

1.4.3 Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi



Gambar1. 1 Struktur Organisasi

1.4.4 Kegiatan Umum Perusahaan/Instansi

BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS, menetapkan kebijakan

teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya, serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi dan Inspektora Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Sekretariat Utama terdiri dari beberapa Biro, setiap Biro terdiri dari beberapa Bagian dan setiap Bagian terdiri dari beberapa Subbagian. Sekretariat Utama terdiri dari Biro Bina Program, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Biro Umum [1].

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terdiri dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Direktorat Diseminasi Statistik, dan Direktorat Sistem Informasi Statistik.

Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri dari Direktorat Statistik Kependudukan & Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Deputi Bidang Statistik Produksi terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan, Direktorat Peternakan, Perikanan & Kehutanan dan Direktorat Statistik Industri.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi & Jasa

terdiri dari Direktorat Statistik Harga, Direktorat Statistik Distribusi, dan Direktorat Statistik Keuangan, TI & Pariwisata.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri dari Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Neraca Pengeluaran, dan Direktorat Analisis & Pengembangan Statistik.

Inspektorat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional. Instansi Vertikal BPS terdiri dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi [1].

1.5 Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Praktikum di Lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan serta ikut melakukan pekerjaan dengan mentor atau teknisi lapangan.

1.5.2 Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pembimbing lapangan terkait dengan pekerjaan yang akan di kerjakan serta syarat terpenuhinya spesifikasi yang di perlukan dalam proses penyusunan.

1.5.3 Studi Literatur

Dilakukan dengan cara mencari referensi-referensi sebanyak mungkin yang bisa membantu proses pembuatan alat baik dari *internet* maupun dari buku.

1.6 Sistematika Penulisan

a. BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian atau gambaran secara umum tentang apa yang menjadi pokok dalam Prkatik Kerja Lapangan (PKL), tujuan praktik kerja lapangan, tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan, aspek umum kelembagaan, metode pengumpulan data, serta sistematikan penulisan laporan.

b. BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang materi atau teori yang di ambil pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL).

c. BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan dan kegiatan yang dilakukan pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL).

d. BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran setelah mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL).